



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **Latar Belakang**

pemenuhan prasarana merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas/prasarana pendidikan secara memadai. Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru belakang ini juga melahirkan berbagai permasalahan yang perlu segera dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu permasalahan yang muncul adalah fenomena ketidakmampuan sekolah untuk menerima para pendaftar. Hal ini dikarenakan jumlah siswa pendaftar membludak melebihi jumlah kursi yang disediakan. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan pada aspek pemerataan fasilitas/prasarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Akibatnya terjadi ketimpangan jumlah pendaftar pada sekolah-sekolah yang terletak di permukiman padat penduduk dengan sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari permukiman penduduk. Perencanaan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dengan demikian diarahkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Memperhatikan uraian kondisi di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan sebuah penelitian guna menganalisa kebutuhan fasilitas/prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang sesuai dengan kebijakan zonasi. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan fasilitas/prasarana pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah.

Dengan mendasarkan perencanaan pendidikan pada tren kependudukan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan akses pendidikan yang belum merata di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sidoarjo di masa yang akan datang, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu melakukan penelitian ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



## **Studi Literatur**

Ketersediaan prasarana pendidikan merupakan faktor pertama yang menjadi perhatian dalam pembangunan sosial ekonomi (Aref, 2011). Dengan kata lain pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan salah satunya dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Satu SD/MI memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Dalam pendidikan, fungsi produksi merupakan hubungan matematik atau statistik yang menggambarkan bagaimana sumber-sumber pendidikan (inputs) diubah menjadi hasil pendidikan yang bersifat segera (outputs) dan tidak segera (outcome) melalui sebuah proses pendidikan (Cohn and Gesk 1990 dalam Ghozali). Fungsi produksi

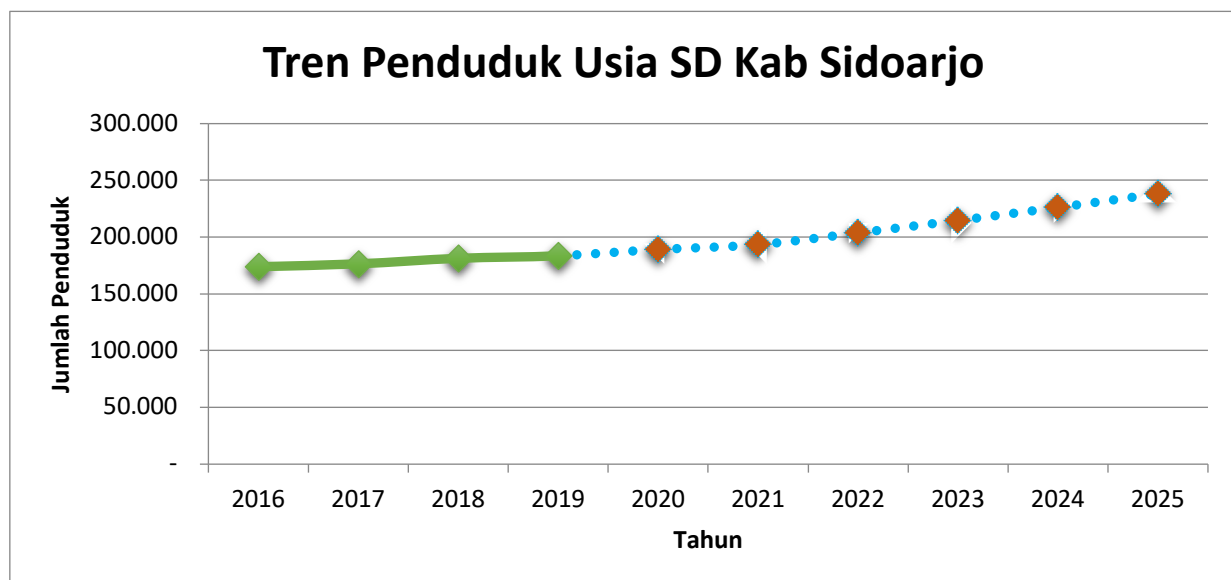
**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



pendidikan dalam hal ini diperankan oleh sekolah. Windham mendefinisikan input pendidikan sebagai sumber-sumber yang digunakan dalam aktifitas produksi pendidikan.

## Temuan Utama

### Proyeksi Penduduk Usia SD Kabupaten Sidoarjo



**Gambar 1. Proyeksi Penduduk Usia SD Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan gambar 1 di atas terlihat bahwa bentuk trend proyeksi penduduk usia SD di Kabupaten Sidoarjo berbentuk eksponensial. Jika tahun 2016 dijadikan sebagai penduduk tahun dasar, maka diperkirakan penduduk usia SD Kabupaten Sidoarjo akan menjadi 2 (dua) kali lipat pada tahun 2030. Pada gambar 5.1 juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2025 penduduk usia SD Kabupaten Sidoarjo akan berjumlah sebanyak 250.000 jiwa. Pada tahun 2020 diperkirakan penduduk usia SD Kabupaten Sidoarjo akan berjumlah 200.000 jiwa. Artinya dalam 5 (lima) tahun kedepan akan ada penambahan 50.000 jiwa penduduk usia SD di Kabupaten Sidoarjo.

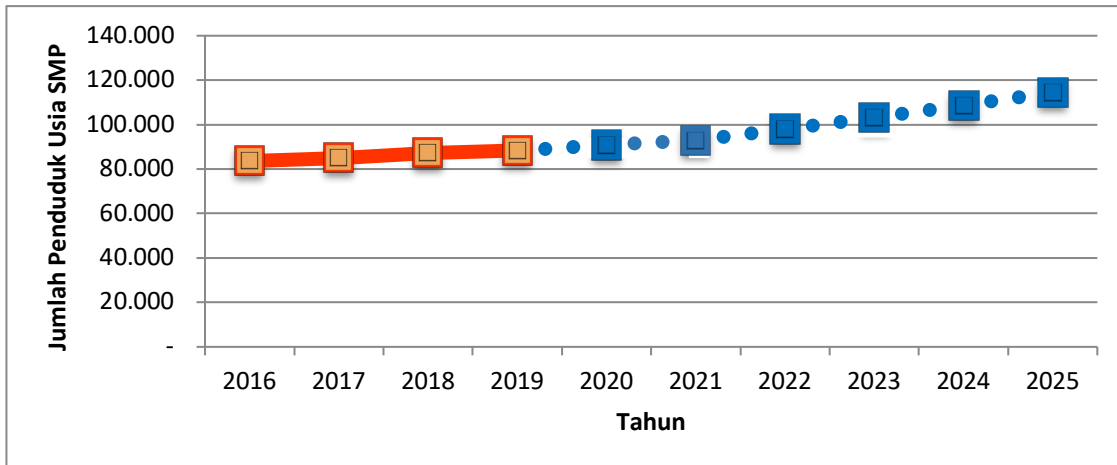
### Proyeksi Penduduk Usia SMP Kabupaten Sidoarjo

Proyeksi selanjutnya adalah dilakukan pada penduduk Kabupaten Sidoarjo yang berusia SMP yaitu usia 13 – 15 tahun. Perhitungan proyeksi pada sub-bab ini dilakukan sampai pada tahun 2025. Klasifikasi usia peserta didik untuk SMP berdasarkan Permendikbud

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



Nomor 44 tahun 2019. Hasil grafik proyeksi penduduk usia SMP di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

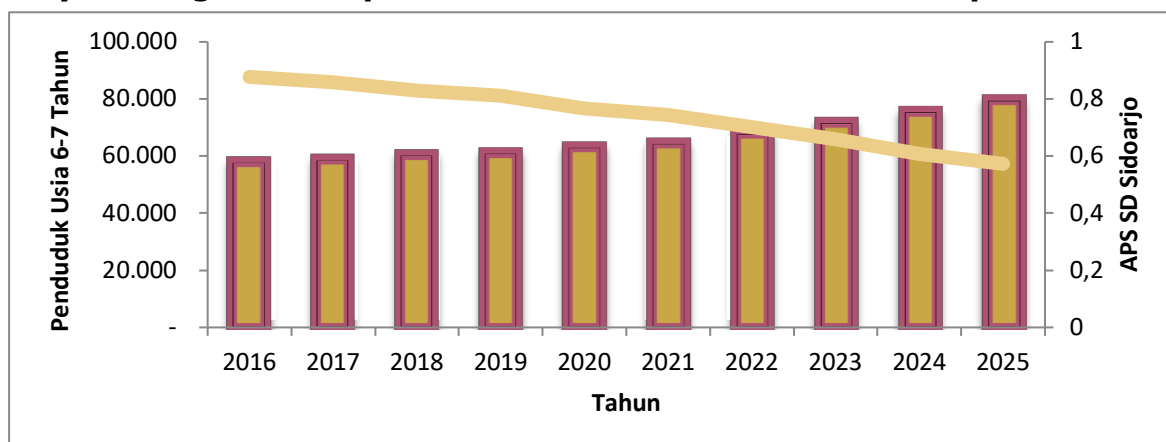


Sumber : Sensus Penduduk 2010, Suspas 2015

**Gambar 2 Proyeksi Penduduk Usia SMP Kabupaten Sidoarjo**

Pada gambar 2 memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan penduduk usia SMP berbeda dengan pola pertumbuhan penduduk usia SD yang terlihat pada gambar 5.1. Pola penduduk usia SMP mengikuti pola pertumbuhan linier. Artinya penduduk usia SMP mempunyai kecepatan pertumbuhan lebih lambat dari kecepatan pertumbuhan penduduk usia SD. Tren pada gambar 5.2 menunjukkan bahwa penduduk usia SMP Kabupaten Sidoarjo diperkirakan melewati angka 100.000 jiwa pada tahun 2022. Artinya 2 (dua) tahun dari tahun laporan ini dibuat, penduduk usia SMP kabupaten Sidoarjo akan melewati angka 100.000 jiwa.

**Proyeksi Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 6-7 Kabupaten Sidoarjo**



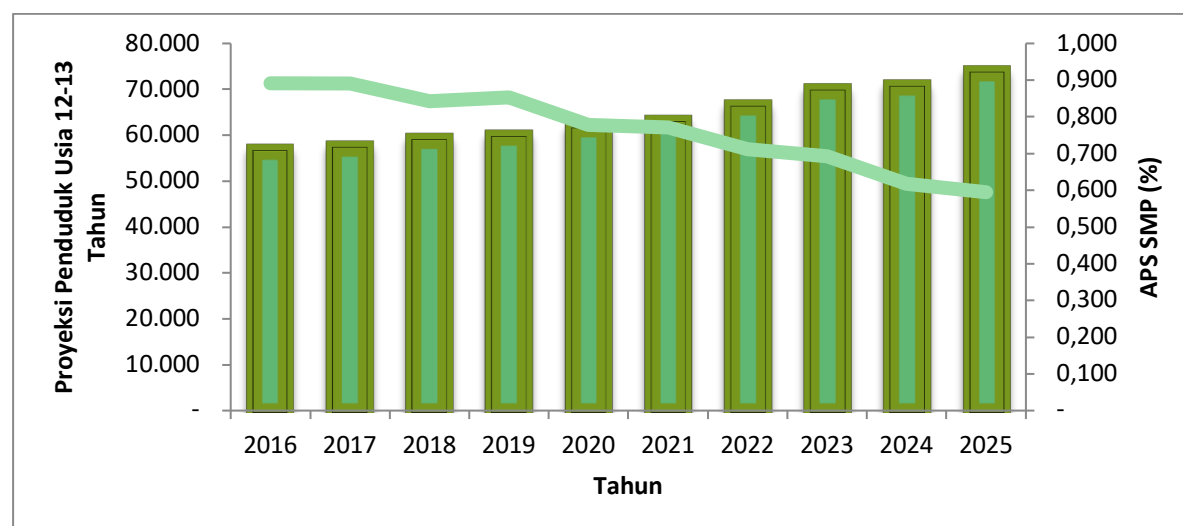
**Gambar 3 Proyeksi APS dan Penduduk Usia 6-7 di Kabupaten Sidoarjo**

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



Berdasarkan gambar 3 memperlihatkan bahwa tren APS SD di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan daya serap fasilitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo juga mengalami penurunan. Dari data yang ada pada gambar 5.3 menunjukkan bahwa penduduk usia 6-7 tahun akan diproyeksi akan mencapai angka 80.000 di tahun 2025. Namun daya serap dari fasilitas sekolah di tahun tersebut diperkirakan hanya berkisar 60%. Artinya jika diasumsikan bahwa pada tahun 2025 tidak ada penduduk usia 6-7 tahun di Kabupaten Sidoarjo yang bersekolah di luar Kabupaten Sidoarjo. Maka dengan fasilitas pendidikan SD yang ada saat ini diperkirakan akan terdapat sekitar 35.000 penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan dasar.

### Proyeksi Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 12-13 Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Sensus Penduduk 2010, Suspas 2015, Dapodik Kemendikbud

### Gambar 4 Proyeksi APS dan Penduduk Usia 12-13 di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar 4 memperlihatkan bahwa tren APS SMP di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan daya serap fasilitas pendidikan untuk level SMP di Kabupaten Sidoarjo juga mengalami penurunan. Dari data yang ada pada gambar 5.4 menunjukkan bahwa penduduk usia 12-13 tahun akan diproyeksi akan mencapai angka 70.000 di tahun 2025. Namun daya serap dari fasilitas sekolah di tahun tersebut diperkirakan hanya berkisar 60%. Artinya jika diasumsikan bahwa pada tahun 2025 tidak ada penduduk usia 12-13 tahun di Kabupaten Sidoarjo yang bersekolah di luar Kabupaten Sidoarjo. Maka dengan fasilitas pendidikan SMP yang ada saat ini

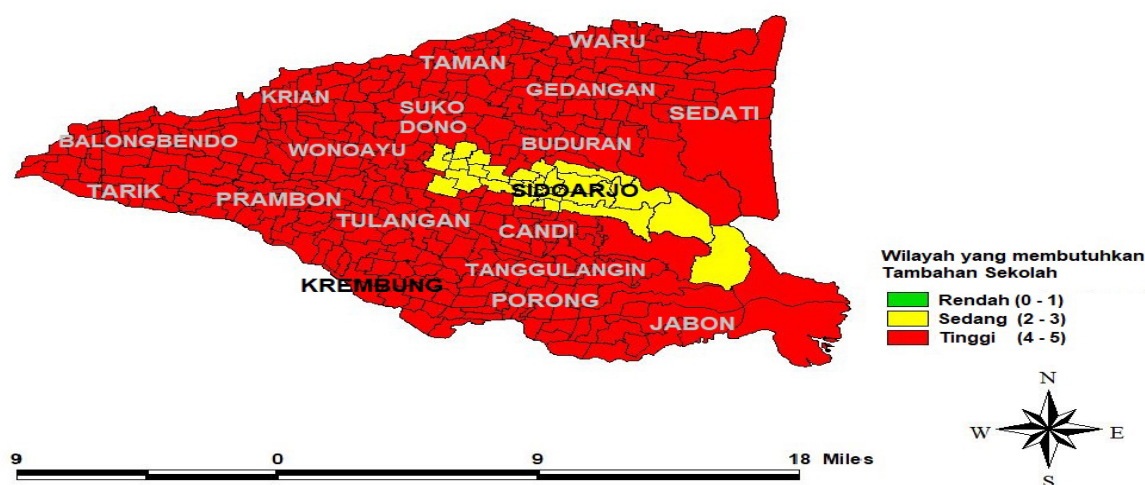
**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



diperkirakan akan terdapat sekitar 22.500 penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

### Proyeksi Kebutuhan SD di Kabupaten Sidoarjo

#### Proyeksi Kebutuhan SD Tahun 2025



**Gambar 5 Proyeksi Kebutuhan SD di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025**

Gambar 5 menunjukkan proyeksi untuk kebutuhan pembangunan SD baru per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2025. Pada tahun 2025, dengan asumsi tidak adanya penambahan SD baru selama periode proyeksi, maka terlihat bahwa hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 membutuhkan tambahan SD baru sebanyak 4 -5 unit. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Sidoarjo pada tahun 2025 membutuhkan tambahan SD baru sebanyak 2 – 3 unit.

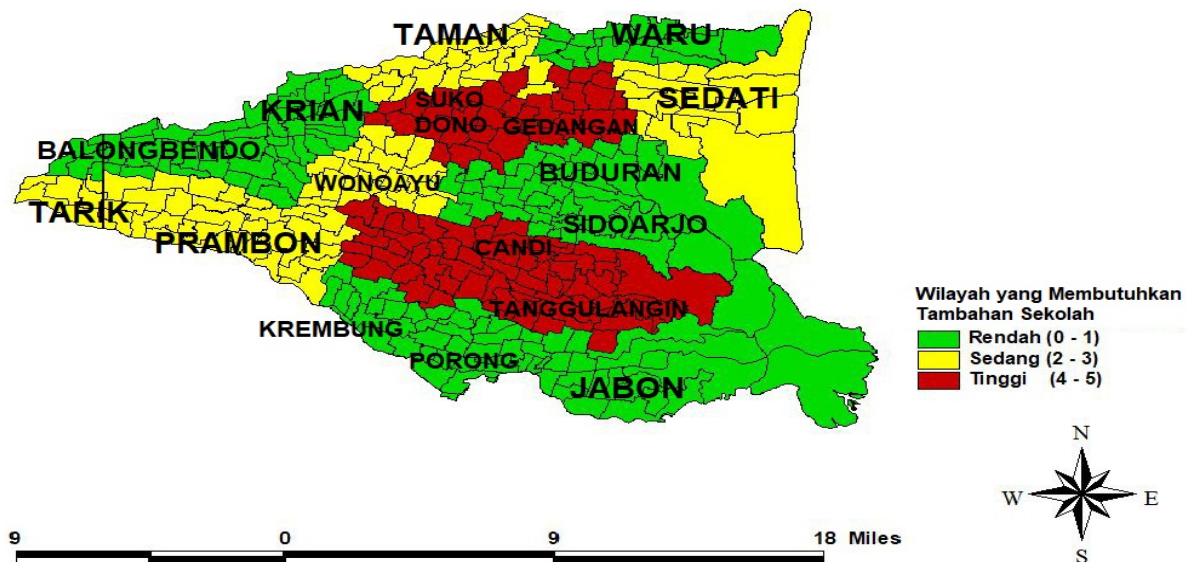
### Proyeksi Kebutuhan SMP di Kabupaten Sidoarjo

Proyeksi daya serap SMPN untuk peserta didik baru dengan kondisi sekarang pada tahun 2025 diperkirakan hanya mampu menyerap 59.88 jiwa. Sedangkan untuk daya serap SMPN sendiri diproyeksikan pada tahun 2025 hanya mampu menyerap 22,7% dari proyeksi peserta didik baru usia 12-13 tahun.

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



**Proyeksi Kebutuhan SMP Tahun 2025**



**Gambar 6 Proyeksi Kebutuhan SMP di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025**

Gambar 6 menunjukkan proyeksi untuk kebutuhan pembangunan SMP baru per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2025. Pada tahun 2025, dengan asumsi tidak adanya penambahan SMP baru selama periode proyeksi, maka terlihat bahwa Kecamatan Sukodono, Gedangan, Candi dan Tanggulangin pada tahun 2025 membutuhkan tambahan SMP baru sebanyak 4 -5 unit. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Taman, Sedati, Wonoayu, Tarid dan Prambon pada tahun 2025 membutuhkan tambahan SMP baru sebanyak 2 – 3 unit.

**Proyeksi Estimasi Biaya Tambahan Kebutuhan Ruang SDN Kabupaten Sidoarjo**

Pada tahun 2020 sebenarnya kebutuhan biaya untuk membangun ruang SDN baru hanya berada diangka Rp. 145 Milyard. Jumlah tersebut meningkat secara kumulatif tiap tahunnya akibat tidak terpenuhinya bangunan ruang SDN baru di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga secara kumulatif diperkirakan kebutuhan biaya penambahan ruang SDN baru di Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2025 adalah sebesar Rp. 402 Milyard.

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



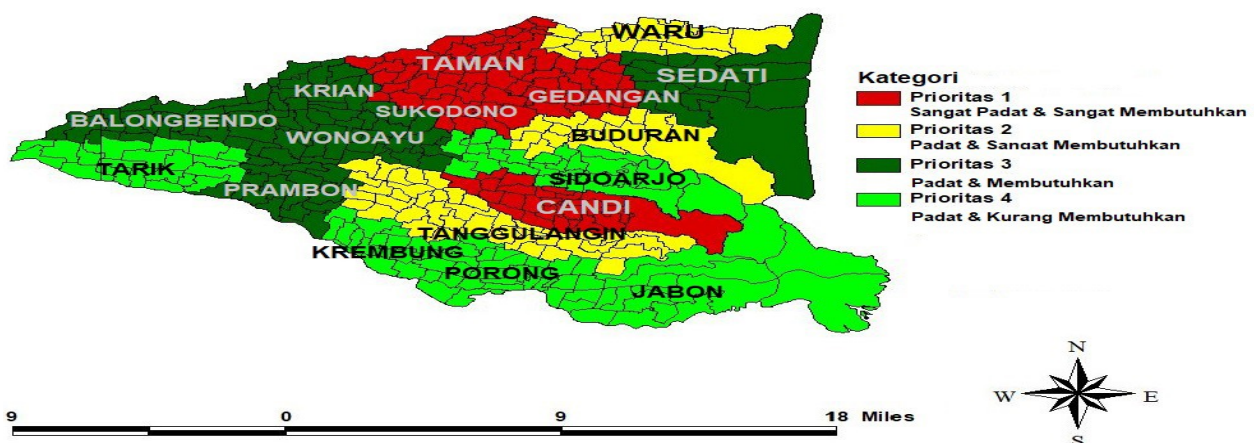
**Proyeksi Estimasi Biaya Tambahan Kebutuhan Ruang SMPN Kabupaten Sidoarjo**

Pada tahun 2020 sebenarnya kebutuhan biaya untuk membangun ruang SMPN baru hanya berada diangka Rp. 72 Milyard. Jumlah tersebut meningkat secara kumulatif tiap tahunnya akibat tidak terpenuhinya bangunan ruang SMPN baru di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga secara kumulatif diperkirakan kebutuhan biaya penambahan ruang SDN baru di Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2025 adalah sebesar Rp. 167 Milyard.

**Prioritas Wilayah Pembangunan SDN di Kabupaten Sidoarjo**

Hasil *spatial analisis* menggunakan indikator kepadatan penduduk dan proyeksi penduduk usia SD. Didapat hasil untuk wilayah pembangunan prioritas SDN, terbagi menjadi 4 (empat) kategori. Kategori 1 (satu) adalah prioritas 1 yaitu sangat padat dan sangat membutuhkan pembangunan SDN baru. Kategori 2 (dua) adalah wilayah prioritas 2 yaitu padat penduduk dan sangat membutuhkan pembangunan SDN baru. Kategori 3 (tiga) adalah wilayah prioritas 3 yaitu padat penduduk dan membutuhkan pembangunan SDN baru. Terakhir kategori 4 adalah wilayah prioritas 4 yaitu padat penduduk namun kurang membutuhkan pembangunan SDN baru.

**Prioritas Pembangunan SD Berdasarkan Tingkat Kepadatan Penduduk dan Proyeksi Penduduk Usia SD**



**Gambar 7 Wilayah Prioritas Pembangunan SDN Proyeksi 2020 – 2025**



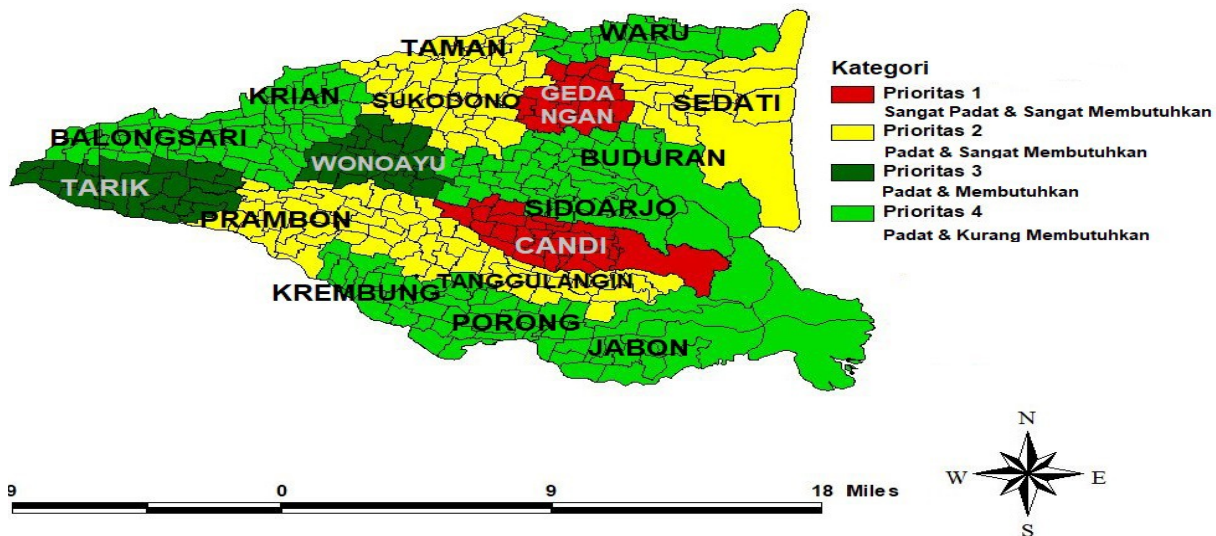
**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



**Prioritas Wilayah Pembangunan SMPN di Kabupaten Sidoarjo**

Hasil *spatial analisis* menggunakan indikator kepadatan penduduk dan proyeksi penduduk usia SMP. Didapat hasil untuk wilayah pembangunan prioritas SMPN, terbagi menjadi 4 (empat) kategori. Kategori 1 (satu) adalah prioritas 1 yaitu sangat padat dan sangat membutuhkan pembangunan SMPN baru. Kategori 2 (dua) adalah wilayah prioritas 2 yaitu padat penduduk dan sangat membutuhkan pembangunan SMPN baru. Kategori 3 (tiga) adalah wilayah prioritas 3 yaitu padat penduduk dan membutuhkan pembangunan SMPN baru. Terakhir kategori 4 adalah wilayah prioritas 4 yaitu padat penduduk namun kurang membutuhkan pembangunan SMPN baru.

**Prioritas Pembangunan SMP Berdasarkan Tingkat Kepadatan Penduduk dan Proyeksi Penduduk Usia SMP**



**Gambar 8 Wilayah Prioritas Pembangunan SMPN Proyeksi 2020 – 2025**

**Rekomendasi Kebijakan Bappeda Sidoarjo**

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas maka saran kebijakan kajian ini adalah sebagai berikut :

- a Perencanaan penambahan ruang dan sekolah baru baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta hendaknya mengikuti pola spasial dan demografi yang sudah ada.

**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISA KEBUTUHAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DALAM PEMENUHAN**  
**AKSES PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**



- b Mengingat besarnya jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menambah ruang kelas dan atau sekolah baru maka kerjasama dengan pihak swasta akan sangat dibutuhkan.
- c Dikarenakan Sekolah merupakan salah satu faktor penarik orang untuk berpindah tempat, maka disarankan pembangunan sekolah baru baik SDN maupun SMPN diarahkan ke wilayah perbatasan antar kecamatan untuk mengurangi kepadatan penduduk.
- d Diperlukan kajian yang lebih teknis untuk menentukan lokasi-lokasi mana saja yang berpotensi untuk didirikan SDN atau SMPN baru yang sejalan dengan wilayah prioritas.
- e Diperlukan kajian lanjutan untuk menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah baik Guru maupun tenaga kependidikan.
- f Diperlukan kajian lanjutan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sidoarjo.